



LTKL

LINGKAR TEMU
KABUPATEN
LESTARI

KERANGKA DAYA SAING DAERAH (KDSD)



I. LATAR BELAKANG

Lingkaran Temu Kabupaten Lestari (LTKL) merupakan asosiasi pemerintah kabupaten di Indonesia yang telah mendeklarasikan diri untuk berkomitmen dalam mempercepat implementasi SDG dan penurunan emisi melalui prinsip open government pada bulan Juli 2017. Sejak saat itu, anggota LTKL telah menyetujui bahwa pengukuran dan pelaporan perkembangan komitmen daerah merupakan hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Sistem pelaporan daerah yang kredibel akan mendorong daya saing daerah dan menarik potensi insentif yang keberlanjutan.

Walaupun SDGs dan penurunan emisi gas rumah kaca telah disepakati sebagai 'payung utama', LTKL menyetujui bahwa fokus utama saat ini yaitu pada transformasi rantai pasok beberapa komoditas seperti Kopi, Hasil Hutan Bukan Kayu, Kakao, Kelapa Sawit, Karet, Rempah dan Kelapa. Melalui komoditas, kabupaten diharapkan mampu mengidentifikasi elemen kunci terkait yurisdiksi berkelanjutan yang dapat didefinisikan dari kebijakan nasional dan menarik potensi pasar dan investasi.

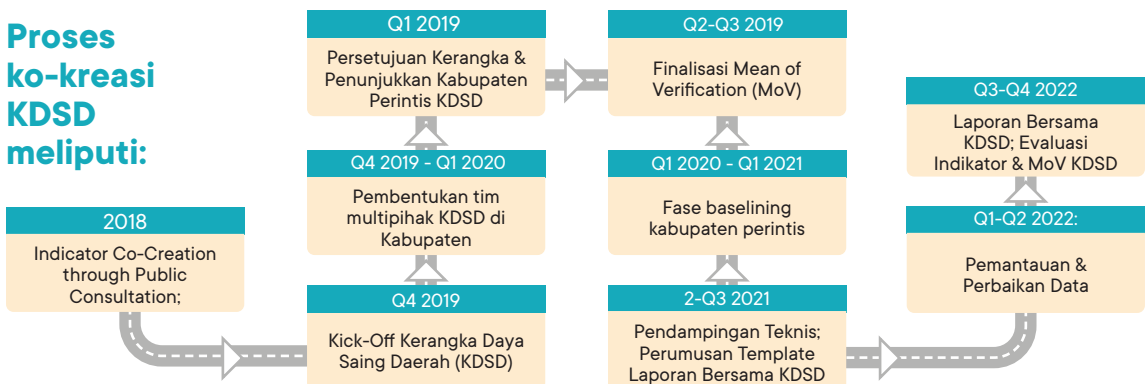


II. PROSES KO-KREASI KDSD

Sekretariat LTKL bersama dengan kabupaten anggota dan jaringan mitra LTKL memformulasikan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang merupakan rangkuman dari kebijakan nasional dan Kerangka berbasis pasar untuk peningkatan produktivitas komoditas lestari, yang diselaraskan dengan kebijakan di daerah. Tujuan utama dari KDSD adalah menyederhanakan proses pengukuran dan pelaporan pada kabupaten anggota LTKL. Selain itu, dengan merangkum kriteria dan kerangka utama diharapkan kabupaten mampu melaksanakan salah satu proses untuk berbagai kegunaan.

Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) mengkontekstualisasikan transformasi rantai pasok pada komoditas terkait (kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, rempah, kopi dan hasil hutan bukan kayu), menjadi suatu objek penilaian untuk membuktikan kredibilitas pemerintah daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Indikator KDSD Versi 1.0 dirangkum dari beberapa inisiatif skema penilaian dan instrumen peringkat yurisdiksi berkelanjutan yang berhubungan dengan ekosistem pasar komoditas, seperti (i) RSPO Jurisdictional Certification, (ii) Global SDGs Indicator, (iii) TERPERCAYA – INOBU, (iv) Sustainable Landscape Rating Tools – CCBA & (v) SourceUp - IDH Sustainable Trade.

Proses ko-kreasi KDSD meliputi:



III. ELEMEN KUNCI



Aspek
Perencanaan &
Penetapan Tujuan



Aspek
Ketangguhan
Ekonomi



Aspek
Ketangguhan
Sosial



Aspek
Pengelolaan
Sumber Daya Alam



Aspek
Insentif

TIPE DATA:



IV. PROSES IMPLEMENTASI & PEMBELAJARAN

Rapat Umum Anggota LTKL di tahun 2019 & 2020 telah memutuskan lima (5) kabupaten anggota yang berkomitmen secara sukarela untuk menjadi kabupaten perintis Kerangka Daya Saing Daerah: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sintang, Kabupaten Siak, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap kabupaten bersama Sekretariat LTKL dan mitra pembangunan akan membentuk Tim KSD yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan ketersediaan data, menghasilkan data rona awal, penentuan target, serta menghasilkan 2 (dua) produk: Profil Yurisdiksi dan Laporan Bersama KSD. Target KSD akan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan kabupaten secara sukarela untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hasil dari pemeriksaan ketersediaan data dan uji coba rona awal akan membantu dalam memberikan informasi ke pemerintah nasional dan pasar terkait kondisi terkini proses monitoring dan pelaporan di daerah. Melalui hal ini, kolaborasi yang lebih besar akan terdorong untuk mengatasi keterbatasan yang ada.

Sebagai produk akhir, Anggota LTKL diharapkan dapat menghasilkan Laporan Bersama KSD untuk menunjukkan proses kemajuan komitmennya berdasarkan penilaian KSD. Laporan tersebut disiapkan secara sukarela melalui kolaborasi multipihak dan ditujukan kepada pemangku

kepentingan yang siap memberikan insentif yang bersifat keberlanjutan. Untuk memastikan hal ini, perumusan format Laporan Bersama KSD dilaksanakan melalui ko-kreasi multipihak untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait. Setelah kick-off di tahun 2019, proses ko-kreasi tetap dilanjutkan melalui penyelarasan indikator KSD Versi 1.0 dengan kerangka pelaporan lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten. Beberapa di antaranya:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kemendagri
- LandScale – Rainforest Alliance
- Accountability Framework initiative (AFI)
- Alliance for Water Stewardship (AWS)
- International Social & Environment Accreditation & Labelling (ISEAL)
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Tropical Forest Champions – EII

Pada akhir siklus pertama implementasi KSD di kabupaten perintis, akan dilakukan evaluasi terhadap KSD Versi 1.0 untuk menyesuaikan dengan pembelajaran dari implementasi di lapangan serta mengakomodir kerangka-kerangka yang baru, sehingga dapat dihasilkan indikator & MoV yang lebih tajam.

KABUPATEN PERINTIS KSD

